

ISSN : 1693-7287

J
u
r
n
a
l

KEWARGANEGARAAN

Volume 26 : Nomor 01, Juni 2016

Meningkatkan Hasil Belajar dan Partisipasi Mahasiswa Dalam Mata Kuliah
Ekologi Kewarganegaraan Melalui Penerapan Model Pembelajaran Aktif
Sri Yunita

Peradilan Adat di Nias dan Keadilan Restoratif
Beni Harmoni Harefa

Penanggulangan Masalah Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan
Civil Forfeiture Khususnya *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*
Bisdan Sigalingging

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan
Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Nancy Yosepin Simbolon

Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
(Studi Kasus: Polres Serdang Bedagai)
Helen Karolina Hutauruk dan Sri Hadiningrum

Diaspora dan Konsep Dwi Kewarganegaraan
Julia Ivanna

Globalisasi Sebagai Sebuah Proses Ekonomi
(Sebuah Analisis Deskriptif Tentang Evolusi Ideologi Pasar)
Prayetno, Budi Ali Mukmin dan Ramsul Nababan

Pemahaman Masyarakat Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama
di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat
Laurentus H. Lumban Gaol dan Hodriani

Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial- Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

JURNAL KEWARGANEGARAAN

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Pembina

Rektor Universitas Negeri Medan
Dekan FIS Unimed

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dewan Penyunting Pakar

Djanius Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Warsono, Prof. Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

Ketua Penyunting

Drs. Buha Simamora, SH., MH

Pelaksana Penyunting

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Sekretaris Penyunting

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

Ramsul Nababan, SH., MH

Alamat Redaksi :

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221

Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002

E-mail PPKn@Plasa.com

Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan “Jurnal Kewarganegaraan”.

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi penyunting

| | |
|--|-----|
| Pengantar Redaksi | iii |
| Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran | |
|  Meningkatkan Hasil belajar dan Partisipasi Mahasiswa Dalam Kuliah Mata Kuliah Ekologi Kewarganegaraan Melalui Penerapan Model Pembelajaran Aktif Sri Yunita | 1 |
| Analisis Hukum | |
|  Peradilan Adat di Nias dan Keadilan Restoratif Beniharmoni Harefa | 16 |
|  Penanggulangan Masalah Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan <i>Civil Forfeiture</i> Khususnya <i>Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture</i> Bisdan Sigalingging | 29 |
|  Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Nancy Yosepin Symbolon | 50 |
|  Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus: Polres Serdang Bedagai) Helen Karolina Hutauruk dan Sri Hadiningrum | 65 |
| Wacana Demokrasi dan Politik | |
|  Diaspora dan Konsep Dwi Kewarganegaraan Julia Ivanna | 88 |
|  Globalisasi Sebagai Sebuah Proses Ekonomi (Sebuah Analisa Deskriptif Tentang Evolusi Ideologi Pasar) Prayetno, Budi Ali Mukmin dan Ramsul Nababan | 106 |
|  Pemahaman Masyarakat Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Laurentus H. Lumban Gaol dan Hodriani | 121 |

Pengantar

Redaksi

Jurnal Kewarganegaraan setiap diterbitkan mengacu kepada tiga kategori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit *Jurnal Kewarganegaraan* memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 26 Nomor 01, Juni 2016 menandakan bahwa "*Jurnal Kewarganegaraan*" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 26 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan tujuh tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Hukum, Demokrasi dan Politik.

Rubrik "**Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran**" yang membahas tentang Partisipasi Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Ekologi Kewarganegaraan Melalui Penerapan Model Pembelajaran Aktif, oleh **Sri Yunita**, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah: 1) implementasi model pembelajaran aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah Ekologi Kewarganegaraan? 2) peningkatan hasil belajar Ekologi Kewarganegaraan mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran aktif? 3) peningkatan aktivitas dan partisipasi mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran aktif?.

Untuk rubrik "**Analisis Hukum**" dibahas oleh **Beniharmoni Harefa** membahas tentang Peradilan Adat Di Nias Dan Keadilan Restoratif, secara keseluruhan dapat disimpulkan Pendekatan sistem hukum saat ini, lebih cenderung pada pendekatan keadilan restoratif. Kerangka pendekatan keadilan restoratif, akar nilai yang diusung lahir dari nilai-nilai tradisional. Dalam masyarakat tradisional dikenal nilai-nilai seperti nilai keseimbangan, keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat. Tulisan ini hendak mengkaji nilai-nilai dalam peradilan adat Nias (kearifan lokal Nias) kaitannya dengan peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Studi kasus khususnya dalam penyelesaian perkara pelecehan terhadap perempuan (kasus Kadali) dan telah menjalani sidang adat pada 19 Oktober 2015. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Nias (khususnya peradilan adat Nias) kaitannya pada peradilan pidana berbasis

keadilan restoratif yakni keharmonisan, kedamaian dan keseimbangan. Penyelesaian kasus Kadali menjadi contoh penting, bagaimana konflik dapat diselesaikan dengan mempertemukan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Menggunakan kearifan lokal yang ada, bertujuan mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat, yang sempat rusak dan terganggu, kembali ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Penyelesaian konflik itu sesuai dengan hakikat keadilan restoratif (*restorative justice*).

Sedangkan, **Bisdan Sigalingging** membahas tentang Penanggulangan Masalah Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan *Civil Forfeiture* Khususnya *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, kebijakan penanggulangan korupsi berdasarkan *criminal forfeiture* menghukum pelaku dalam bentuk penderitaan fisik/badan melalui putusan pidana penjara. Kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mampu melindungi korban dan meminimalisir kuantitas korupsi serta kerugian negara melalui ganti rugi. Upaya kebijakan penanggulangan korupsi secara non penal untuk melindungi korban dapat dilakukan melalui penggunaan *civil forfeiture* khususnya *NCB Asset Forfeiture* untuk memulihkan aset-aset yang tercemar/ternodai kejahatan dengan menggunakan jalur perdata khusus melalui penetapan hakim pengadilan. *NCB Asset Forfeiture* lebih memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban karena berorientasi pada perbaikan, pemulihan hak-hak perdata korban daripada penjatuhan pidana penjara, denda, maupun ganti rugi. *NCB Asset Forfeiture* justru lebih melindungi hak asasi korban seluruh warga negara Indonesia dari pada melindungi hak asasi koruptor.

Sedangkan **Nancy Yosepin Simbolon** membahas tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara keseluruhan dapat disimpulkan Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi masyarakat yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam tulisan ini ditemukan solusi bahwa hubungan konsumen dan pelaku usaha adalah saling ketergantungan, kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Kemudian **Helen Karolina Hutauruk dan Sri Hadiningrum** membahas tentang Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus: Polres Serdang Bedagai), secara keseluruhan dapat disimpulkan upaya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu, *pertama* upaya pre-emptif, yaitu upaya pencegahan dini yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyuluhan. *Kedua* upaya preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan razia, patroli. *Ketiga* upaya represif, yaitu upaya penindakan atau pengakuan hukum. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, *pertama* minimnya personel kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah masyarakatnya. *Kedua*, minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba. *Ketiga*, alokasi dana dalam pemberantasan narkoba masih minim. *Keempat*, bocornya informasi saat akan dilakukannya penggerebek atau penangkapan. *Kelima*, pelaku yang sudah ditangkap tidak mau memberikan informasi terkait dengan jaringan sindikatnya. *Keenam*, kurangnya perhatian pemerintah terhadap mantan narapidana sehingga sering terjerat dengan kasus yang sama lagi.

Sedangkan rubrik “**Wacana Demokrasi dan Politik**” yang di tulis oleh **Julia Ivanna**, mengangkat Isu tentang Diaspora dan Konsep Dwi Kewarganegaraan, secara keseluruhan dalam tulisannya dapat disimpulkan Isu dwikewarganegaraan yang diusulkan para diaspora yang semakin hari semakin berkembang serta mengetahui peran diaspora Indonesia. Diaspora yang sudah lama terbentuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara asal. Partisipasi dalam pembangunan bukan hanya dalam bentuk *remitansi*, tetapi juga dapat meningkatkan hubungan ekonomi antara dua negara, memperluas basis ekonomi, mendorong perkembangan perdagangan, investasi yang membuka lapangan pekerjaan, transfer ketrampilan, teknologi, dan budaya. Potensi ini akan lebih besar lagi bila pemerintah Indonesia dapat memberikan pelayanan atau dukungan sebaik-sebaiknya. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh para Diaspora Indonesia, maka pendekatan keimigrasian bagi para Diaspora Indonesia dapat menjadi jalan tengah untuk menjembatani antara kepentingan negara dengan tetap mempertahankan prinsip kewarganegaraan tunggal dan keinginan para Diaspora Indonesia untuk memperoleh dwikewarganegaraan.

Sementara, **Prayetno, Budi Ali Mukmin dan Ramsul Nababan**, membahas tentang Globalisasi Sebagai Sebuah Proses Ekonomi (Sabuah

Analisis Deskriptif Tentang Evolusi Ideologi Pasar), secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, konsep globalisasi sebagai sebuah proses integrasi ekonomi dunia. Banyak studi yang mengeksplorasi secara rinci bagaimana evolusi pasar dan perusahaan-perusahaan internasional melahirkan bentuk-bentuk interdependensi dan kian intensif. Dalam dua dekade terakhir, konsep globalisasi menjadi metafora baru bagi kelompok pendukung utopia pasar abad sembilan belas untuk pandangan neoliberal. Inti neoliberalisme meliputi prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan, pasar bebas yang tak terbatas, pemangkasan regulasi pemerintah, dan dukungan pada model pembangunan sosial yang evolusioner sesuai dengan pengalaman negara-negara barat yang diyakini dapat diterapkan diseluruh dunia.

Diakhir tulisan ini **Laurentus H Lumban Gaol dan Hodriani**, mengangkat Issu tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, pemahaman masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama di desa Salak 1 dapat dikatakan masih dalam kategori sedang dengan hasil persentasi sekitar 66.65%.

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi

THE
Character Building
UNIVERSITY

GLOBALISASI SEBAGAI SEBUAH PROSES EKONOMI (Sabuah Analisis Deskriptif Tentang Evolusi Ideologi Pasar)

Oleh: Prayetno*, Budi Ali Mukmin** dan Ramsul Nababan***

Abstract

This paper actually want to deepen the study of the concept of globalization as a process of integration of the world economy. Many studies explore in detail how the evolution of the market and international companies gave to forms of interdependence and intensified. In the last two decades, the concept of globalization became a new metaphor for the support group of nineteenth-century utopia market for their neoliberal view. The core creed of neoliberalism includes the priorities of economic growth, the importance of free trade to stimulate economic growth, unlimited free market, trimming government regulation, and support the evolutionary model of social development in accordance with the experience of western countries that are believed to be applicable throughout the world.

Keyword; Globalization, Economic Process

A. PENDAHULUAN

Globalisasi, merupakan sebuah kata yang tidak lagi asing di telinga kita, namun sangat sulit menemukan pemahaman yang tepat tentang globalisasi ekonomi. Setidaknya ada tiga hal yang sering kita temukan dalam mendefinisikan globalisasi, yakni salinghubungan, integrasi, dan salingketerkaitan. Penulisan ini berangkat dari perdebatan-perdebatan baik di kalangan akademisi maupun di ruang-ruang publik, tentang ideologi globalisasi.

Lebih dari empat puluh tahun silam, di Amerika terjadi perdebatan intelektual yang sengit menyoal matinya politik ideologis di Negara-negara industri barat. Meskipun tesis yang dikemukakan oleh Daniel Bell maupun Fukuyama tidak semuanya benar, karena saat inipun ideologi masih ada bersama kita. Awal abad 21 (keduapuluh satu) justru menjadi ruang pertempuran ideologi-ideologi yang berbenturan. Kelompok protagonis utama yaitu ideologi pasar bebas yang tengah dominan, yang kita kenal dengan

* Prayetno, S.IP., M.Si adalah Dosen Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negari Medan

** Budi Ali Mukmin, S.IP., M.A. adalah Dosen Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negari Medan

*** Ramsul Nababan, S.H., M.H adalah Dosen Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negari Medan

globalisme, telah manjumpai perlawanan yang serius. Globalisme merupakan ideologi politik dominan saat ini, yaitu sistem ideologi dominan yang membuat klaim tentang proses-proses sosial. Kelompok globalis menyodorkan kepada publik dengan agenda-agenda politik yang mendukung neoliberal.

Dalam dua dekade terakhir, konsep globalisasi menjadi metafora baru bagi kelompok pendukung utopia pasar abad sembilan belas untuk pandangan neoliberal mereka. Kredo inti neoliberalisme meliputi prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan, pasar bebas yang tak terbatas, pemangkasan regulasi pemerintah, dan dukungan pada model pembangunan sosial yang evolusioner sesuai dengan pengalaman negara-negara barat yang diyakini dapat diterapkan diseluruh dunia.

Globalisasi menjadi epos perubahan yang menentukan dan secara radikal sedang mentransformasikan hubungan-hubungan lembaga-lembaga ekonomi dan sosial pada abad ke-21.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa terjadi pergeseran dari sistem politik ekonomi proteksionisme menuju ideologi pasar?

Dalam menjelaskan dan menyederhanakan kenyataan-kenyataan di atas, penulis mencoba memahaminya dengan meminjam istilah Robert Gilpin, yang menjelaskan bahwa adanya kecenderungan-kecenderungan yang mengglobal pada hubungan internasional.¹

B. PERDEBATAN TENTANG GLOBALISASI

Perdebatan tentang globalisasi terjadi dalam dua arena yang terpisah namun berhubungan, satu pertempuran terjadi dalam ruang sempit akademis, sementara pertempuran yang lainnya terletak di arena wacana publik.

Partisipasi utama dalam perdebatan akademik hidup dan menjalar di Negara-negara kaya di belahan bumi utara, khususnya Amerika Serikat dan Britania Raya. Pengaruh intelektual mereka yang jauh melampaui jumlahnya tak hanya mencerminkan relasi kuasa yang ada, namun juga dominasi global ide-

¹ Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism The World Economy in the 21 Century*. Princeton University Press. 2000. 47.

ide *Anglo-Amerika*. Meskipun mereka memiliki kerangka intelektual yang sama, para akademisi ini mempunyai perbedaan pandangan yang sangat tajam mengenai definisi globalisasi, skala, kronologi, dampak dan akibat kebijakannya.

Seperti yang diungkapkan di atas para akademisi banyak merespon tantangan analitis dengan mencoba memiliki konsep tentang globalisasi. Akibatnya pada tahun 1970-an semakin banyak akademisi yang mengungkapkan globalisasi untuk menjelaskan berbagai; proses ekonomi, politik dan kultural yang tengah terjadi. Belum ada definisi globalisasi yang secara umum di terima, kecuali gambaran umum seperti “peningkatan keterkaitan global”, “pemanfaatan ruang dan waktu”, “serangkaian proses yang kompleks, yang didorong oleh panduan pengaruh ekonomi politik”, dan “perpindahan dan arus yang melintasi batas-batas Negara”.² Sejumlah peneliti menolak pendekatan tersebut, sebagian kecil lainnya bahkan melangkah lebih jauh dengan menolak total keberadaan globalisasi.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memperkenalkan berbagai macam pendekatan akademik yang paling dominan mengenai prsoalan tersebut ini, dan menjelaskan mengapa terjadi pergeseran ideologi ke arah pasar yang lebih bebas. Ada tiga pandangan kelompok yang menilai pengertian globalisasi sekarang sebagai sesuatu yang tidak akurat, banyak keliru dan berlebihan terhadap globalisasi

A. Kelompok pertama

Para intelektual yang menolak manfaat globalisasi sebagai konsep analitik biasanya mengajukan argumen mereka berdasarkan kritik yang lebih keras tentang penggunaan istilah-istilah kabur dalam wacana akademik. Susan Strange menilai globalisasi sebagai contoh utama penggunaan istilah yang kabur, dan mengatakan globalisasi telah di gunakan dalam wacana akademik untuk “mengacu pada segala sesuatu dari mulai

² Frank J. Lechner dan Jhon Boli, ed., *The Globalizations Reader*, Oxford: Blacwell Publisher 2000.

internet sampai Hamburger”.³ Untuk memahami globalisasi, ia harus di eksplorasi sebagai proses obyektif dengan kajian yang lebih mendalam proyek ideologis dari globalisme. Karena globalisasi sekarang diidentifikasi sudah di tumpangi oleh berbagai muslihat oleh para ideolog tertentu, untuk mengisi agenda globalisasi ini dengan nilai dan makna yang mengukuhkan agenda politik mereka sendiri.

B. Kelompok kedua

Kelompok skeptis kedua menekankan terbatasnya proses globalisasi yang tengah terjadi. Tulisan Paul Hirst dan Graham Thompson barangkali merupakan cermin dari perspektif ini.⁴ Keduanya menilai bahwa dunia ekonomi bukan merupakan fenomena global sesungguhnya, namun berpusat di Eropa, Asia Timur, dan Amerika Utara. Mayoritas aktivitas ekonomi di dunia tetap berskala nasional dan berakar di tingkat domestik. Kedua penulis memperingatkan akan bahayanya pengambilan kesimpulan yang menegaskan globalisasi berdasarkan tingginya interaksi ekonomi di Negara-negara industri maju. Keduanya membantah adanya globalisasi ekonomi dengan berlandaskan pada data-data empiris. Tanpa adanya sistem ekonomi yang benar-benar global, tidak akan benar ada globalisasi.

Penilaian yang berlebihan mengenai hukum besi globalisasi akan melahirkan dampak politik yang fatal. Misalnya bagaimana kekuasaan-kekuasaan politik tertentu telah menggunakan tesis globalisasi ekonomi untuk mengusulkan deregulasi ekonomi nasional dan penyunatan-penyunatan program-program kesejahteraan. Kebijakan-kebijakan seperti ini di ambil untuk menguntungkan kepentingan neoliberal.

³ Susan Strange, *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*, Cambridge: Cambridge university Press, 1996. hal.xii-xiii

⁴ Paul Hirst, Graham Thompson, *Globalizations in Question: The International Economy and Possibilities of Governance*, edisi kedua, Cambridge: polity Press, 1999.

C. Kelompok ketiga

Kelompok yang terakhir dari yang skeptis menolak bahwa lebel globalisasi adalah sesuatu yang baru. Mereka mengatakan bahwa globalisasi telah di terapkan dalam konteks sejarah yang tidak tepat. Robert Gilpin, mengatakan globalisasi bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah terjadi jauh sebelum perang dunia pertama. Tingkat transaksi ekonomi pasca perang hanya memulihkan globalisasi setara dengan yang pernah terjadi sebelum 1913.⁵

Dengan demikian secara keseluruhan ketiga kelompok tersebut memberikan kontribusi mengenai perdebatan globalisasi.

D. GLOBALISASI SEBAGAI SABUAH PROSES EKONOMI.

Banyak studi yang mengeksplorasi secara rinci bagaimana evolusi pasar dan perusahaan-perusahaan internasional melahirkan bentuk-bentuk interpedensi dan kian intensif. Studi-studi ini mencontohkan pertumbuhan lembaga-lembaga internasional seperti Uni Eropa, NAFTA, dan blok perdagangan lainnya.⁶ Kajian-kajian ekonomi mengenai globalisasi menyampaikan pandangan bahwa esensi dari fenomena tersebut meliputi “meningkatnya keterkaitan ekonomi nasional melalui perdagangan, aliran keuangan dan investasi asing langsung (FDI) melalui perusahaan-perusahaan multinasional”. Sehingga kegiatan yang ekspansif diidentifikasi baik sebagai aspek utama dari globalisasi maupun sebagai mesin di balik lajunya perkembangan globalisasi.

Banyak akademisi dengan perspektif ekonomi seperti ini menilai globalisasi sebagai fenomena riil yang menandai transformasi besar dalam persoalan dunia. Afirmasi mereka yang kuat atas globalisasi berpuncak pada pendapat bahwa perubahan kuantum dalam persoalan umat manusia telah

⁵ Manfred B. Steger, *Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar*, Lafadl, Yogyakarta, Juni 2006, hal.35.

⁶ Robert O.Keohane, Joseph S.Nye, Jr, *Globalization What's New? What's Not (and so What's)*, Foreign Policy 118, 2000, hal.104.

terjadi ketika aliran teknologi, perdagangan, dan investasi yang melintasi batas-batas Negara berubah dari tetesan menjadi banjir yang tak terkendali.

Kajian mengenai globalisasi ekonomi biasanya tertancap kuat dalam narasi histori yang melacak pada tahapan kemunculan ekonomi dunia pasca perang hingga konferensi Bretton Woods. Di bawah kepemimpinan ekonomi Amerika Serikat dan Inggris, kekuatan ekonomi barat memutuskan untuk mengubah kebijakan proteksionis masa antar-perang (1918-1939) dengan komitmen ingin memperluas perdagangan internasional. Hasil utama dari konferensi Bretton Woods meliputi liberalisasi terbatas atas perdagangan dan penciptaan aturan-aturan yang mengikat kegiatan ekonomi internasional. Selain itu, para peserta konferensi Bretton Woods sepakat untuk menciptakan sistem pertukaran mata uang yang stabil, dimana mata uang setiap Negara di patok terhadap dolar AS yang nilainya di seajajarkan dengan harga emas.⁷ Dengan batasan-batasan tersebut setiap Negara bebas mengatur persoalan-persoalan lain di dalam wilayah kekuasaan mereka, yang memungkinkan mereka bisa membuat agenda perekonomian mereka sendiri, termasuk menjalankan kebijakan kesejahteraan sosial yang luas.

Selama hampir tiga dekade awal pendiriannya, sistem Bretton Woods berperan penting dalam tercapainya era keemasan kapitalisme kontrol. Menurut penafsira ini, mekanisme kontrol Negara terhadap perputaran modal internasional yang ada saat itu memungkinkan terhindarnya pengangguran dan terwujudnya Negara kesejahteraan. Naiknya upah buruh dan meningkatnya upah sosial di Negara-negara kaya di belahan utara bumi merupakan kompromi kelas kontemporer.

Kebanyakan ahli globalisasi ekonomi melacak kaitan kecenderungan integrasionis dalam ekonomi global yang kian laju dengan kejatuhan sistem Bretton Woods di awal 1970-an. Sebagai tanggapan terhadap perubahan besar dalam perekonomian dunia yang mengurangi daya saing berbagai industri yang

⁷ Manfred G. Steger, *op cit.*, hal 39.

berbasis di Amerika Serikat, pada tahun 1971 presiden Nixon memutuskan untuk membatalkan sistem pertukaran tetap yang berbasis pada nilai emas. Kombinasi gagasan politik dan perkembangan ekonomi baru ini sampai tingginya inflasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingginya angka pengangguran, defisit sektor publik, dua krisis minyak dalam satu dekade, melahirkan kemenangan pemilu yang spektakuler bagi partai-partai yang konservatif di Amerika Serikat dan Inggris. Partai partai ini melapangkan jalan gerakan neoliberal untuk melakukan ekspansi pasar internasional. Ekspansi ini tidak lepas dari dukungan deregulasi sistem keuangan domestik, penghapusan bertahap atas kontrol kapital, dan drastisnya peningkatan transaksi keuangan global.

Selama 1980-an sampai 1990-an, segala ikhtiar Anglo Amerika untuk mendirikan pasar global tunggal semakin diperkuat melalui persetujuan liberalisasi perdagangan dalam banyak bidang yang semakin meningkatkan perputaran sumber daya ekonomi yang melintasi batas-batas Negara. Munculnya paradigma neoliberal kian mendapat legitimasi dengan runtuhnya perekonomian bercorak komando di Eropa Timur tahun 1989-1991. dengan goyangnya konsensus ekonomi pasca perang yang berprisnip Keynesian, teori-teori pasar bebas muncul sebagai ortodoksi ekonomi baru yang mendorong reduksi atas sejarah kesejahteraan, menyusutkan pemerintah, dan deregulasi ekonomi. Tekanan berlebihan terhadap moneteris untuk melawan inflasi mendorong terciptanya pasar buruh yang fleksibel, yang berarti menyingkirkan prioritas Full Employment ala kebijakan Keynesian. Selain itu peralihan dramatis dari dominasi Negara menjadi dominasi pasar disertai teknologi yang merendahkan ongkos transportasi dan komunikasi, nilai perdagangan dunia meningkat dari 57 milyar dolar AS pada tahun 1947 menjadi 6 triliun dolar AS di tahun 1990-an.⁸

⁸ *Ibid*, hal. 42.

Barangkali dua aspek penting dari globalisasi ekonomi berkaitan dengan perubahan ciri proses produksi dan internasionalisasi transaksi finansial. Banyak analis sepakat menganggap kemunculan sistem finansial transnasional sebagai ciri fundamental yang melandasi masa sekarang ini. Sebagaimana di katakana oleh Manuel Castells, proses globalisasi keuangan secara dramatis mengalami pereratan pada akhir 1980-an ketika pasar modal dan saham di Eropa dan Amerika Serikat di deregulasi. Lewat pembatasan yang lebih sedikit dan kesempatan penanaman modal yang global, liberalisasi perdagangan finansial itu memberi ruang pada kian cairnya berbagai macam segmen industri keuangan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain.⁹

Sejak awal tahun 1980-an, isu-isu ekonomi dan situasi ekonomi global semakin menjadi pusat perhatian dalam hubungan politik dan ekonomi internasional, sejak akhir abad kesembilan belas. Banyak komentator mencatat adanya suatu pergeseran yang amat mendalam dari dunia yang di dominasi Negara menjadi dunia yang di dominasi pasar. Meningkatnya arti penting pasar, yang tercermin dengan meningkatnya arus barang, modal dan jasa internasional, telah di dorong dengan menurunnya biaya transportasi dan komunikasi, runtuhnya ekonomi pusat (yang di dominasi oleh Negara), serta meningkatnya pengaruh ideologi ekonomi konvensional berdasarkan resep-resep kebijakan ekonomi. Kebangkitan pasar ini benar-benar merupakan kembalinya era meluasnya globalisasi pasar, produksi dan keuangan pra-perang dunia pertama.

Pada saat pergantian abad, isu-isu yang muncul dari globalisasi ekonomi mengkonfrontasikan masyarakat-masyarakat nasional dengan komunitas internasional. Segera setelah berakhirnya perang dingin hampir setiap ekonomi, eksekutif bisnis, dan pemimpin politik baik di Negara industri maju maupun Negara industri baru menyatakan harapan mereka bahwa globalisasi ekonomi akan menuju pada satu dunia yang dicirikan oleh ekonomi-ekonomi yang terbuka dan sejahtera, demokrasi politik dan kerja sama

⁹ Manuel Castells, *Informations Technology and Global Capitalisme*, ed. Will Huton dan Anthony Giddens, New York, New Press, 2000, hal. 53.

internasional. Meskipun demikian, dengan berlalunya tahun 1990-an, khususnya dalam menanggapi kekacauan ekonomi global pasca 1997, reaksi negatif yang kuat terhadap globalisasi merebak, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang.¹⁰

Menurut tesis globalisasi, perubahan cepat hubungan-hubungan manusia dalam bentuk arus perdagangan, investasi dan teknologi dengan jumlah besar yang melintasi batas-batas nasional telah berkembang dari sekedar tetesan menjadi banjir. Cakupan kegiatan politik, ekonomi, dan sosial menjadi mendunia, dan interaksi antar Negara dan masyarakat di banyak wilayah telah meningkat. Sementara proses-proses integrasi semakin luas dan mendalam secara global, sebagian percaya bahwa pasar telah menjadi atau sedang menjadi mekanisme penting yang menentukan hubungan-hubungan domestik dan internasional. Dalam suatu perekonomian global yang demikian terintegrasi, Negara-negara bangsa (nation state) sepertinya bertentangan dengan zaman yang merupakan kemunduran. Ekonomi kapitalis yang di cirikan oleh perdagangan tanpa regulasi, arus investasi dan kegiatan-kegiatan internasional perusahaan-perusahaan multinasional sepertinya juga menguntungkan yang kaya maupun yang miskin.¹¹

Meskipun istilah-istilah globalisasi sekarang di gunakan secara luas, globalisasi ekonomi baru membawa beberapa perkembangan kunci dalam perdagangan, keuangan dan investasi langsung asing lewat perusahaan multinasional. Sejak berakhirnya perang dunia kedua, perdagangan internasional telah demikian berkembang dan telah menjadi faktor yang lebih penting dalam hubungan-hubungan ekonomi domestik dan internasional.¹² Dengan adanya ekspansi perdagangan dunia yang cepat ini, persaingan internasional juga semakin meningkat. Meskipun sektor konsumen dan ekspor di dalam masing-masing Negara memperoleh keuntungan dari meningkatnya

¹⁰ Robert Gilpin & Jean Millis Gilpin, *Tantangan Kapitalisme Global Ekonomi Dunia Abad ke-21*, terj. Haris Munandar & Dudy Priatna, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal.5-6.

¹¹ *Ibid*, hal. 6.

¹² *Ibid*, hal. 7.

keterbukaan ekonomi, banyak bisnis harus bersaing terhadap perusahaan-perusahaan asing yang efesienya telah sangat di perbaiki. Selama tahun 1990-an, persaingan perdagangan menjadi sangat sengit ketika semakin banyak ekonomi industri baru bergeser dari strategi substitusi impor menjadi pertumbuhan yang didorong ekspor. Namun pesaing utama perusahaan-perusahaan Amerika adalah perusahaan Amerika lainnya.

Terdapat sejumlah perkembangan penting yang mendasari berlangsungnya ekspansi perdagangan global. Sejak perang dunia kedua, hambatan-hambatan perdagangan dunia secara signifikan menurun karena keberhasilan putaran-putaran negosiasi perdagangan.¹³ Sebagai contoh, sejak akhir tahun 1970-an deregulasi dan privatisasi lebih jauh telah membuka keran-keran impor ekonomi-ekonomi nasional. Dan kemajuan telekomunikasi dan informasi telah mengurangi biaya dan hal ini telah mendorong ekspansi perdagangan internasional. Dengan mengambil keuntungan dari perubahan-perubahan ekonomi dan teknologi ini, semakin banyak bisnis yang mengembangkan cakrawala bisnisnya dalam operasinya melibatkan pasar-pasar internasional.

Revolusi keuangan ini telah menghubungkan ekonomi-ekonomi nasional secara erat satu sama lain secara signifikan sehingga meningkatkan ketersediaan modal bagi Negara-negara berkembang, dan dalam kasus pasar-pasar yang tumbuh di Asia Timur, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Namun demikian, karena sebagian arus keuangan ini berjangka pendek, mudah berubah, dan pada dasarnya bersifat spekulatif, keuangan internasionalpun menjadi aspek paling rentan dan tidak stabil pada ekonomi kapitalis global. Dengan demikian pemerintah dengan mudah bisa menjadi mangsa para spekulan mata uang, sebagaimana yang terjadi pada krisis keuangan Eropa tahun 1992 (yang menyebabkan Inggris menarik diri dari mekanisme kurs eropa (ERM), runtuhnya Peso Meksiko tahun 1994-1995, dan krisis keuangan

¹³ Garry Burtless, Robert Z. Lawrence, Robert E. Litan, and Robert J. Shapiro, *Globaphobia: Confronting Fears about Open Trade*, Washington D.C, Brooking Institution, 1998, hal.4-5.

Asia Timur yang sedemikian parah di akhir tahun 1990-an. Sementara bagi sebagian pihak, globalisasi keuangan justru menunjukkan kesehatan dan kejayaan kapitalisme global serta sangat menguntungkan, bagi sebagian orang lain sistem keuangan internasional sepertinya di luar kendali, dan memerlukan perbaikan regulasi.

Istilah globalisasi ekonomi menjadi populer penggunaannya dalam paruh waktu kedua tahun 1980-an dalam kaitannya dengan lonjakan besar investasi asing (FDI) oleh perusahaan multinasional (MNCs). Penanaman modal asing berkembang secara signifikan di akhir tahun 1980-an. Terlepas dari terbatasnya lingkungan globalisasi perusahaan, MNCs dan FDI merupakan hal-hal yang sangat penting dalam ekonomi global. Globalisasi ekonomi didorong oleh perkembangan-perkembangan politik, ekonomi dan teknologi. Pemanfaatan ruang dan waktu akibat kemajuan sarana komunikasi dan transportasi telah demikian mengurangi biaya perdagangan internasional.

Penjelasan di atas merupakan perjalanan globalisasi sebagai sebuah proses pengintegrasian ekonomi. Perjalanan globalisasi sebagai sebuah proses ekonomi, pada dasarnya tidak bisa di justifikasi, salah dan benar. Hal ini di karenakan globalisasi dalam pemahaman di atas hanyalah sebuah proses. Dampak negatif dan positif sebuah ideologi baru, merupakan konsekwensi dari sebuah kenyataan yang ada. Peran institusi, dan perilaku pasar merupakan faktor yang menentukan dari kenyataan negatif dan positifnya globalisasi ekonomi.

E. KRIRIK TERHADAP GLOBALISASI EKONOMI

Terlepas apakah globalisasi hanya sebuah proses pengintegrasian ekonomi, maupun sisi positif yang di bawa globalisasi, namun kekhawatiran akibat dampak yang merusak dari globalisasi ekonomi sebetulnya tidak hanya menjadi monopoli Negara dunia ketiga saja, tetapi juga masyarakat di Negara industri maju. Masyarakat di Negara ini juga di khawatirkan oleh munculnya perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional yang menanamkan modal mereka keluar negeri untuk mendapatkan keunggulan komparatif, seperti sumber daya alam, pajak yang rendah, maupun upah yang murah. Mereka

menganggap perusahaan seperti ini menyebabkan tingginya angka pengangguran di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Ini karena dengan menginvestasikan usahanya diluar negeri, masyarakat-masyarakat di Negara industri maju tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pekerja bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain itu kekhawatiran seperti ini juga berangkat dari semakin terpuruknya pasar. Masyarakat di negara maju juga di khawatirkan oleh adanya invansi yang dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari Negara maju lainnya. Misalnya, banyak publik Amerika Serikat merasa khawatir atas serbuan perusahaan-perusahaan dan produk-produk Jepang. Kekhawatiran ini lantas menjadi salah satu penyebab munculnya regionalisme perdagangan. Ketakutan Negara-negara Eropa terhadap dominasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah mendorong terjadi regionalisme melalui pembentukan pasar tunggal Eropa. Sementara Amerika Serikat juga mengembangkan bentuk-bentuk regionalisme melalui NAFTA yang beranggotakan Negara-negara Amerika Utara seperti Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko.¹⁴ Inilah yang kemudian menjadi paradoks dalam globalisasi. Bahwa di tengah globalisasi yang menuntut akses pasar yang semakin terbuka, tetapi yang terjadi malahan bentuk-bentuk perlawanan terhadap globalisasi ekonomi itu sendiri dalam bentuk regionalitas ekonomi. Jelas bentuk-bentuk seperti ini akan semakin sulit mengintegrasikan pasar. Oleh karena itu, Dani Rodrik¹⁵ mengatakan bahwa: Globalisasi yang katanya meleburkan Negara bangsa di dalam entitas global, pada kenyataannya masing-masing Negara masih terisolasi satu dengan yang lainnya.

Pada sisi lainnya, globalisasi menampilkan kecenderungan-kecenderungan yang negatif, seperti munculnya-persoalan-persoalan ekonomi suatu Negara, yang merasa belum siap untuk global, harus terpaksa menerima

¹⁴ Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imprealisme Baru*, Tajidu Press, 2005, hal.111.

¹⁵ Dani Rodrik, *Sens and Nonsense in the Globalization Debate*, dalam Jeffrey A.Freiden and David A.lake, *International Political Economy: Perspective on Global Power and Wealth*, Four Editions Bolton, 2000, hal. 463.

harus menerima-produk-produk luar yang mutunya lebih baik, yang mengakibatkan kegoncangan produk-produk suatu Negara yang berujung pada kolapsnya perusahaan-perusahaan nasional suatu Negara karena kehilangan pembeli barang mereka. Kolapsnya perusahaan nasional tentu di ikuti oleh meningkatnya jumlah pengangguran.¹⁶

Kekhawatiran mengenai akibat-akibat buruk yang di timbulkan oleh globalisasi juga menyangkut dimensi pemerataan pendapatan, dan dengan demikian menyangkut keuntungan yang di peroleh Negara-negara berkembang dalam proses tersebut. Ini pada akhirnya juga menyangkut kesejahteraan umat manusia. Pendapatan masyarakat dinegara-negara berkembang menurun drastik jika di bandingkan dengan pendapatan masyarakat di Negara maju pada era tahun 60-an sampai 70-an. Ini berarti bahwa seiring proses globalisasi juga memunculkan kemiskinan, dan dengan demikian kesenjangan. Masyarakat di Negara maju menikmati kemakmuran yang melimpah, sementara masyarakat di dunia ketiga masih hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Fenomena ini tercermin dari data yang di laporkan oleh UNDP pada tahun 1992. Di perkirakan bahwa 20% dari populasi dunia yang tinggal di Negara-negara termiskin hanya memperoleh 82,7% dari total pendapatan dunia, sementara 20% lainnya yang tinggal di Negara-negara termiskin hanya menerima 1,4%.¹⁷ Data diatas setidaknya menunjukkan kecenderungan yang negatif antara globalisasi dengan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tesis kaum neoliberalis. Pada kenyataannya, hanya Negara-negara maju yang menikmati keuntungan dari globalisasi ekonomi. Hal ini di karenakan Negara-negara yang cerdas dan dengan perangkat kelembagaan ekonomi dan politik yang kuatlah yang bisa mengeliminasi dampak-dampak negative dari gelombang pergerakan financial global. Negara-negara tidak perlu mengeluarkan peluh

¹⁶ Budi Suryadi, *Ekonomi Politik Modern*, Ircisod, Yogyakarta, Oktober 2006, hal. 128.

¹⁷ Dikutip dari martin Khor, *Globalisasi perangkat Negara-negara Selatan*, Cenderelas Pustaka rakyat Cerdas, Yogyakarta 1999.

untuk menghasilkan barang dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tetapi cukup hanya dengan merekayasa finansial global.¹⁸

Di sisi lain, hasil-hasil perundingan GATT dan WTO ditengarai semakin menyulitkan Negara-negara miskin. Mereka dipaksa membuka seluas-luasnya wilayah mereka untuk investasi, sementara di sisi lain perusahaan-perusahaan nasional mereka tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang mempunyai banyak keunggulan, baik dalam bidang teknologi, manajemen dan informasi. Akibatnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional di Negara-negara berkembang gulung tikar, itulah yang terjadi pada Negara-negara di Amerika Latin seiring dengan masuknya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.

E. KESIMPULAN

Pemahaman yang mendalam dan jelas tentang globalisasi sangat diperlukan dalam memahami globalisasi ekonomi. Pemahaman tersebut dimaksudkan agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang justifikasi salah dan benar, baik dan buruk dalam menyikapi fenomena globalisasi.

Pada dasarnya globalisasi hanyalah sebuah proses. Baik proses pengintegrasian ekonomi maupun proses kesalin-tergantungan. Jika kita memahami globalisasi sebagai sebuah proses ekonomi maka kita tidak perlu menyalahkan globalisasi. Yang kita butuhkan adalah memaknai dan mengarahkan globalisasi dengan segala kemampuan kita. Walaupun perkembangan globalisasi ekonomi banyak menyebabkan ketimpangan di semua lapisan masyarakat, namun sebagai sebuah proses, globalisasi juga membawa manfaat dan dampak yang positif terhadap kemajuan dunia. Hal itu tergantung kita dan bagaimana Negara-negara di dunia ini menyiasati dan mengarahkan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁸ Mohamad Sadli, *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2002, hal. 368.

- Burtless, Garry dan Robert Z. Lawrence, Litan E. Litan, Robert E. Shapiro , *Globaphobia: Confronting Fears about Open Trade*, Washington D.C, Brooking Institution, 1998.
- Castells, Manuel dan Will Huton, Anthony Giddens, *Informations Technology and Global Capitalisme*, New York, New Press, 2000.
- Gilpin, Robert dan Gilpin Jean Millis, *Tantangan Kapitalisme Global Ekonomi Dunia Abad ke-21*, terj. Haris Munandar & Dudy Priatna, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gilpin, Robert, *The Challenge of Global Capitalism The World Economy in the 21 Century*, Princeton University Press, 2000.
- Hirst, Paul dan Graham Thomson, *Globalizations in Question: The International Economy and Possibilities of Governence*, edisi kedua, Cambrodge: Polity Press, 1999.
- Keohane, Robert, O, dan Joseph S. Nye Jr, *Globalization What's New? What's Not (and so What's)*, Foreign Policy 118, 2000.
- Khor, Martin, *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan*, Cinderelas Pustaka rakyat Cerdas, Yogyakarta 1999.
- Lechner, Frank, J, dan Jhon Boli , ed., *The Globalizations Reader*, Oxford: Blacwell Publisher 2000.
- Rodrik, Dani, *Sens and Nonsense in the Globalization Debate*, dalam Jeffrey A.Freiden and David A.lake, *International Political Economy: Perspective on Global Power and Wealth*, Four Editions Bolton, 2000.
- Sadli, Mohamad, *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2002.
- Strange, Susan, *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*, Cambridge: Cambridge university Press, 1996.
- Steger, Manfred, G, *Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar*, Lafadl, Yogyakarta, Juni 2006.
- Suryadi, Budi, *Ekonomi Politik Modern*, Ircisod, Yogyakarta, Oktober 2006.
- Winarno, Budi, *globalisasi Wujud Imprealisme Baru*, Tajidu Press, 2005.